

**PERLINDUNGAN HUKUM KAUM PEREMPUAN DENGAN ADANYA
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**(LAW ENFORCEMENT FOR WOMEN WITH THE CITY OF TANGERANG
REGIONAL REGULATION NUMBER 8 THE YEAR 2005 ABOUT
PROHIBITION OF PROSTITUTION)**

SKRIPSI

Oleh :

LINDA TRI HANDAYANI
NIM. 020710101047

Pembimbing :

JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

Pembantu Pembimbing :

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Giri Sutaryoto dan ibunda Suharti tercinta, yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan untaian doa, kasih sayang, dan bimbingan secara tulus ikhlas. Terimakasihku yang tak ternilai atas kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
2. Almamaterku yang kubanggakan.

MOTTO

Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kau selalu menghargai manusia, baik yang terdapat pada dirimu sendiri maupun orang lain bukan hanya sebagai sarana, melainkan sekaligus sebagai tujuan.

(Immanuel Kant 1724-1804)^{*}

^{*}) Muladi. 2004. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Refika Aditama

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada :

hari : Jumat ,
tanggal : 25 ,
bulan : Mei ,
tahun : 2007 .

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :**Ketua,****Sekretaris,**

ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993

KUKUH BUDI MULYA, S.H., MSi
NIP. 132 283 201

Anggota Panitia Penguji,

1. **JAYUS, S.H., M.Hum** (.....)
NIP. 131 287 088
2. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 132 206 014

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KAUM PEREMPUAN DENGAN ADANYA
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

Oleh :

**LINDA TRI HANDAYANI
NIM 020710101047**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO., S.H., M.H.
NIP. 132 206 014**

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

RINGKASAN

Perlindungan hukum kaum perempuan dengan adanya Peraturan Daerah kota Tangerang No. 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran

Adalah suatu perlindungan hukum dari berlakunya peraturan daerah yang mengatur mengenai pelacuran pada wilayah kota madya Tangerang kabupaten Banten provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran daerah No. 1 Tahun 2005, yaitu pada tanggal 23 November 2005, dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Maret 2005, bertepatan dengan hari jadi kota Tangerang. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut memunculkan korban salah tangkap dalam proses penangkapan seorang wanita yang dijadikan obyek sebagai pelacur sehingga menurut pengamatan saya dengan mendengar dan melihat dalam televisi dan internet banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap wanita sebagai obyek pelacuran, sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat di wilayah kota madya Tangerang atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Penulis mengambil kota madya Tangerang sebagai suatu judul skripsi ini karena ada beberapa faktor, yaitu antara lain pertama karena didalam isi dari pasal Peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu pasal 137 dan pasal 138 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, serta perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai upaya memberi solusi atas permasalahan dari munculnya peraturan daerah tersebut. Dan kedua karena kemudahan dalam mendapatkan data-data maupun informasi baik itu dari media internet dan televisi sehingga memudahkan penulis untuk mengolah atau mengkaji atas pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah prosedur pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran tidak bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Perda Nomor 8 Tahun 2005 memberikan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah agar suatu peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan harus memberikan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan agar tercipta suatu keharmonisan hidup dalam daerah kota madya Tangerang khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Kesimpulan yang di dapat dalam analisa di atas adalah bahwa peraturan daerah kota Tangerang No. 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran tidak sesuai dengan pasal 137 dan pasal 138 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, serta kurang memberi perlindungan hukum khususnya terhadap kaum perempuan sehingga nantinya menimbulkan kekurang harmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fakultas hukum, Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa penulis panjatkan salawat dan salam sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Kaum Perempuan dengan Adanya Peraturan Daerah Kota Tangrang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini banyak memperoleh saran, petunjuk dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Iwan Rachmar Soetijono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatian guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terlaksanakannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Endang Kartika, S.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Kukuh Budi Mulya S.H., M.Si., selaku sekretaris penguji.
3. Ibu Dra. Tutik Patmiati,selaku dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Totok Sudariyanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suadra, S.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Seluruh Keluarga Besar di Sidoarjo, Surabaya, Samarinda dan Tangrang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
9. Kakakku Yunita Rindawaty dan Deasy Dwi Nurhayati yang tiada hentinya memberikan doa dan motivasi selama ini.
10. Ibu Hj. DI Slamet, selaku Pimpinan LKK Tresnawati, Bu Pudjo dan Mbak Ita yang telah memberikan semangat dan kesempatan kerja.
11. Teman-temanku di Sakinah, Cici, Penta, Wini, Vina, Bunga dan lain-lain.
12. Teman-teman Halmahera Tyas, Pandu, Santi, Jumi, yang selalu memberikan semangat dan menghiburku setiap hari.
13. Sahabat-sahabatku Diena, Marinda, Eko, Riyana, Farid, Heru, Pipit, Wulan, Yanti dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a.
14. Teman-teman Angkatan 2002 Ryan, Budi, Firdaus, Nasa, Rika yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah	10
2.3.2 Pengertian Desentralisasi	11
2.3.3 Pengertian Otonomi Daerah	12
2.3.4 Pengertian Perundang-undangan	13
2.3.5 Pengertian Peraturan Daerah	13
2.3.6 Pengertian Pelacuran.....	14

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Pelacuran Bertentangan Dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.....	16
3.2 Perlindungan Hukum Pada Perda Nomor 8 Tahun 2005 Bagi Kaum Perempuan	26

BAB IV PENUTUP..... 34

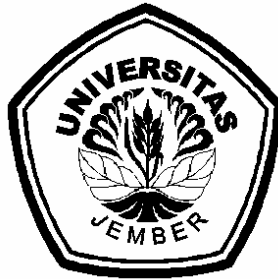
4.1 Kesimpulan	34
-----------------------------	-----------

4.2 Saran	34
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Tangrang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pelacuran



**PERLINDUNGAN HUKUM KAUM PEREMPUAN DENGAN ADANYA
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG LARANGAN PELACURAN**

**(LA W ENFORCEMENT FOR WOMEN WITH THE CITY OF
TANGERANG REGIONAL REGULATION NUMBER 8 THE YEAR 2005
ABOUT PROHIBITION OF PROSTITUTION)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

LINDA TRI HANDAYANI

NIM. 020710101047

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007